

RENCANA STRATEGIS **BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON** **2020 -2024**



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran kegiatan program untuk lima tahun mendatang. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta kerangka penganggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berupaya meningkatkan produksi perikanan budidaya yang diprediksi menjadi salah satu isu strategis dalam permasalahan global. Jumlah produksi Perikanan tangkap pada beberapa tahun belakangan memiliki nilai cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan, beberapa area penangkapan ikan sudah mengalami *overfishing*. Peningkatan permintaan konsumsi ikan semakin meningkat, dan perubahan pola konsumsi pangan berbahan dasar daging putih (ikan) makin tinggi.

Perikanan budidaya memiliki potensi pengembangan yang baik, menciptakan peluang usaha baru dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar (industry).

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi dan program kebijakan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah Timur Indonesia. Mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020 – 2024, Penyusunan rencana strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2020 - 2024 dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program pembangunan budidaya laut, penganggaran serta evaluasi kinerja antara lain Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKAKL dan SAKIP. Penyusunan rencana strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan suatu langkah dalam mewujudkan pencapaian target kinerja yang tidak hanya berbasis pada hasil (*output*) namun juga pada (*outcome*) atau dampak.

Akhir kata, atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, semoga perencanaan target kinerja yang tertuang dalam rencana strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat tercapai sehingga membantu dalam mensukseskan program pemerintah terutama dalam pembangunan kelautan dan perikanan menuju masyarakat KP yang mandiri, berdaulat dan berdaya saing.

Ambon, 27 Agustus 2020

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten memiliki peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumberdaya pembangunan yang akuntabel, mampu memperbaiki kualitas dalam memberikan pelayanan public dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Lima arahan presiden terkait focus pembangunan antara lain pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyerderhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Kelima arahan tersebut dituangkan dalam agenda pembangunan dimana agenda pembangunan kelautan dan perikanan 2020 -2024 terkait dengan agenda penguatan ekonomi.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui PermenKP Nomor 17/PERMEN-KP/2020 merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024 tentang kelautan dan perikanan pembangunan kelautan dan perikanan dalam renstra KKP antara lain : (i) meningkatkan daya saing SDM Kelautan dan Perikanan, (ii) meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, (iii) meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, (iv) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menyukseskan pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain : memperbaiki komunikasi dengan nelayan, optimalisasi potensi perikanan budidaya, pengembangan industrialisasi KP, penguatan wilayah laut dan pesisir, penguatan pengawasan SDKP dan penguatan SDM inovasi riset.

Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ditetapkan melalui perdirjen PB Nomor 272/KEP-DJPB/2020 yang menetapkan pembangunan perikanan budidaya antara lain : meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya, mengoptimalkan kawasan perikanan budidaya berkelanjutan, meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan serta meningkatkan kinerja reformasi birokrasi DJPB.

Perikanan budidaya dianggap memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha baru dan menyerap tenaga kerja. Perikanan Budidaya memiliki beberapa karakteristik, antara lain : (i) dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari pedesaan sampai dengan perkotaan, (ii) mempunyai karakteristik usaha yang cepat menghasilkan (*quick yielding*), keuntungan yang cukup besar, (iii) mempunyai *backward* dan *forward linkage* yang cukup luas, sehingga dapat memacu pembangunan industri hulu maupun hilir (seperti pabrik pakan, hatchery/unit pembenihan, industri jaring, industri pengolahan, *cold storage*, pabrik es dan lain sebagainya), (iv) mampu mengatasi kemiskinan penduduk, dan (v) teknologi terapan yang tersedia cukup banyak dan implementatif untuk dilaksanakan di masyarakat.

Dalam melaksanakan hal tersebut, sesuai dengan renstra DJPB maka tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau dan perikanan budidaya laut. Pelaksanaan tugas dan fungsi tertuang dalam perencanaan kegiatan uji terap teknik dan kerjasama, produksi perikanan budidaya, pengujian sampel HPI pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta pendampingan teknis pada stakeholder/masyarakat.

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Laut

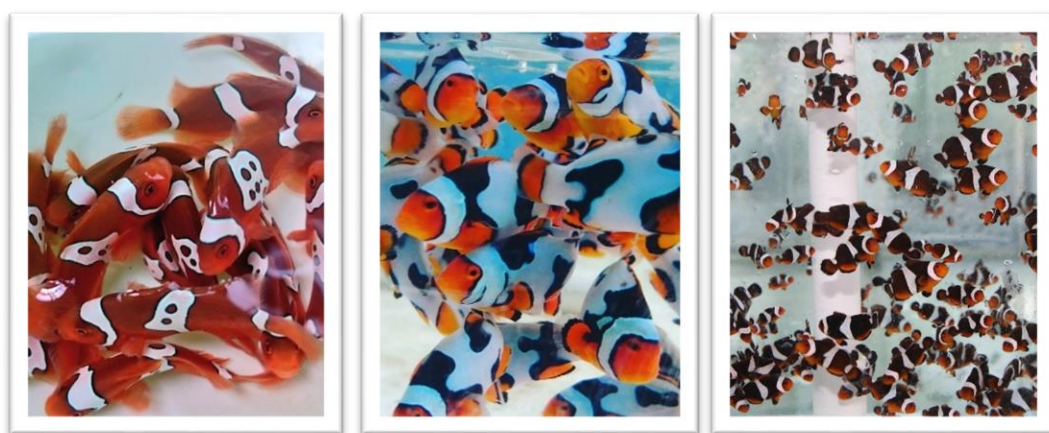
Kegiatan budidaya laut setiap tahun semakin berkembang, hal itu dapat dilihat dari makin banyaknya komoditas unggulan yang dihasilkan oleh Balai – Balai Budidaya. Salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) berdasarkan PERMENKP nomor 6 Tahun 2014 adalah produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya dalam hal ini budidaya laut meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran berbagai jenis komoditas unggulan budidaya laut. Pengembangan komoditas unggulan budidaya di BPBL Ambon semakin bertambah. Pada tahun 2006 – 2010 komoditas unggulan seperti kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), Kerapu bebek (*Chromileptes altivelis*) mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama dalam kegiatan pembenihan. Permintaan Produksi telur kerapu bebek pada rentang tahun 2008 – 2010 mencapai 10 juta butir/siklus produksi. Kualitas telur kerapu yang dihasilkan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dinilai cukup baik. Selain ikan kerapu, ikan kakap putih (*Lates calcarifer*) dan Bubara/Kuwe (*Caranx ignobilis*) saat ini menjadi komoditas unggulan baru BPBL Ambon. Kedua komoditas ini merupakan hasil serangkaian kajian teknis yang panjang dan mendalam untuk mendapatkan metode budidaya yang paling efektif sehingga teknologi pembenihan dan pembesarannya pada saat ini telah dikuasai, dan dampaknya kontinuitas produksi benih masal dua komoditas ini dapat dilaksanakan dengan cukup baik.





Gambar 1. Komoditas Unggulan Budidaya (Ikan Konsumsi Laut)

Pada proses perkembangannya komoditas unggulan budidaya merambah tidak hanya pada ikan konsumsi tetapi ikan hias laut. Pengembangan budidaya ikan hias laut di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon diawali dengan komoditas Clownfish. Clownfish yang dihasilkan di BPBL Ambon merupakan varian hybrid yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran, kapasitas produksi ikan hias clownfish saat ini mencapai 20.000 benih/siklus dan sampai saat ini BPBL Ambon telah berhasil mengembangkan 13 varian clownfish hybrid yang terdiri dari : Clownfish var *Blackphoton*, *Platinum*, *Snowflake*, *Frostbite*, *Black Ice*, *Misbar Photon*, *Piccaso*, *Midnight*, *Lightning maroon*, *Bonet*, *Pellet Pink*, *Pellet Orange*, dan *Biak Biasa*. Selain clownfish ikan hias lain yang dikembangkan adalah Capungan Banggai atau Banggai Cardinal Fish. Produksi Ikan hias banggai diutamakan untuk kegiatan konservasi perairan, dimana ikan hias ini akan banyak di restocking maupun di introduksi pada wilayah perairan baru seperti Teluk Ambon Dalam. Hal ini bertujuan menjaga kelestarian sumberdaya ikan Banggai di habitat aslinya.



Gambar 2. Komoditas Unggulan Budidaya (Ikan Hias Laut)

1.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama BPBL Ambon

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2015 – 2019 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan dengan penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan;
- b. Pengembangan sistem perbenihan ikan untuk pemenuhan kebutuhan induk unggul dan benih bermutu;
- c. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi serta menjaga kondisi lingkungan yang optimal;
- d. Pengembangan sistem prasarana dan sarana yang memadai di kawasan/sentra produksi perikanan budidaya;
- e. Pengawasan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya laut periode 2015 – 2019, pencapaian beberapa indikator kinerja utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon adalah sebagai berikut :

- a. Produksi benih bermutu yang didistribusikan kepada masyarakat tahun 2019 adalah sebesar 824.800 ekor atau 104% dari target yang telah ditentukan. Pencapaian target produksi ini didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM yang memadai.
- b. Produksi induk / calon induk unggul di BPBL Ambon tahun 2019 adalah sebesar 13.995 ekor atau 297% dari target sebesar 4700 ekor. Penyediaan induk dan calon induk unggul merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi BPBL Ambon dalam menunjang peningkatan kegiatan produksi budidaya laut. Induk unggul berdampak pada naiknya produksi benih yang berkualitas dimana benih yang dihasilkan memiliki karakteristik pertumbuhan cepat, tahan terhadap beberapa infeksi penyakit serta memiliki mortalitas rendah.
- c. Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan di BPBL Ambon tahun 2019 mencapai 1869 sampel atau tercapai 202% dari target. Faktor pendukungnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam laboratorium uji yang memadai.
- d. Kelompok yang menerapkan teknologi anjuran budidaya yang termasuk dalam tenaga teknis binaan tahun 2019 adalah sebanyak 1949 orang. Penerapan teknologi anjuran budidaya ditandai dengan adanya pendampingan teknis yang dilakukan pada stakeholder perikanan maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dalam kegiatan budidaya ikan. Melalui sharing informasi menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan produksi, kualitas,

nilai tambah dan daya saing produk perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha budidaya.

- e. Jumlah kawasan yang menerapkan teknologi perikanan budidaya laut pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota.
- f. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 adalah sebesar 509.811.688,- atau sebesar 103,83% dari target.
- g. Kegiatan prekayasa bidang budidaya laut, mencakup kegiatan perbenihan, sarana dan prasarana budidaya maupun terkait kesehatan ikan dan lingkungan budidaya. Pada tahun 2019 kegiatan perekayasa teknologi BPBL Ambon sebanyak 1 paket dan telah terealisasi. Pelaporan kegiatan telah dilakukan setiap triwulan pada direktorat terkait.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi Perikanan Budidaya Laut

BPBL Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memiliki wilayah kerja yang meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Potensi pengembangan kegiatan budidaya laut di wilayah Indonesia Timur masih sangat terbuka karena luasnya lahan serta belum berkembangnya kegiatan budidaya laut di wilayah ini jika dibandingkan dengan wilayah barat. Berikut adalah gambaran potensi perikanan budidaya di beberapa provinsi wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang berasal dari data Badan Pusat Statistik :

Tabel 1. Data Produksi Perikanan Budidaya Laut di Provinsi Gorontalo 2017

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
	Budidaya Laut	Tambak	Kolam
Boalemo	364,60	203,78	553,62
Gorontalo	0	0	3179,29
Pohuwato	4235,51	27.941,68	191,95
Bone Bolango	0,12	0	59,95
Gorontalo Utara	27.680,12	209,45	23,14
Kota Gorontalo	0	0	3143,97
Provinsi Gorontalo	32.280,35	28.354,91	7151,92

Tabel 2. Data Produksi Perikanan Budidaya Laut di Provinsi Sulawesi Utara 2017

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
	Budidaya Laut	Tambak	Kolam
Bolaang Mongondow	0	600,15	61,27
Minahasa	0	0	16,89
Kepulauan Sangihe	0	35,28	259,78
Kepulauan Talaud	0	5,30	0,15
Minahasa Selatan	107.570,40	0	2214,38
Minahasa Utara	31,85	4,70	672,31
Bolaang Mongondow Utara	0	14,71	1,80
Kepulauan Sitaro	0	0	2,16
Minahasa Tenggara	230.508	11,76	7843,68

Bolaang Mongondow Selatan	0	112,89	43,58
Bolaang Mongondow Timur	0	27,18	1279,51
Kota Manado	0	35,28	77,21
Bitung	0	0	0
Kota Tomohon	0	0	102,56
Kotamobagu	0	0	48.719,26
Provinsi Sulawesi Utara	338.110,25	847,28	61.294,54

Tabel 3. Data Produksi Perikanan Budidaya Laut di Provinsi Sulawesi Tengah 2011 - 2015

Sulawesi Tengah/Tahun	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
	Budidaya Laut (Rumput Laut)	Tambak	Kolam
2011	791.268,10	42.057,30	4394,50
2012	935.528,70	36.102,50	6612,20
2013	1.233.812,60	71.611,70	6540,80
2014	1.137.063,06	73.733,61	6511,22
2015	1.274.288,60	113.201,97	8039,99

Tabel 4. Data Produksi Perikanan Budidaya Laut di Provinsi Sulawesi Barat 2014

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
	Budidaya Laut	Tambak	Kolam
Majene	0	10.043,56	1233,55
Polewali Mandar	28.177,90	274.825,00	38.019,71
Mamasa	0	0	41.806,29
Mamuju	32.400,00	49.055,11	574,50
Mamuju Utara	0	89.422,63	13.814,70
Mamuju Tengah	20.034,00	116.490,99	915,00
Provinsi Sulawesi Barat	80.611,90	539.837,28	96.353,75

Tabel 5. Data Produksi Perikanan Budidaya Laut di Provinsi Sulawesi Selatan 2014

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	
	Budidaya Laut	
Kepulauan Selayar	28.960,6	
Bulukumba	53.555,3	
Bantaeng	5.034,7	
Jeneponto	16.799,9	
Takalar	13.431,3	
Gowa	0	
Sinjai	23.504	
Maros	14.714	
Pangkajene dan Kepulauan	8.793,8	
Barru	17.879,2	
Bone	33.504	
Soppeng	0	
Wajo	6.415,4	
Sindereng Rappang	0	
Pinrang	12.823	
Enrekang	0	
Luwu	12.105,2	
Tana Toraja	0	
Luwu Utara	4.143,6	
Luwu Timur	8.649,8	
Toraja Utara	0	
Makassar	12.480,2	

Parepare	4.281,5
Palopo	10.821,5
Provinsi Sulawesi Selatan	287.897

Tabel 6. Data Produksi Perikanan Budidaya Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara 2015

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
	Budidaya Laut
Buton	32.216
Muna	6.761
Konawe	10.249
Kolaka	28.563
Konawe Selatan	151.560
Bombana	15.988
Wakatobi	73.916
Kolaka Utara	93.665
Buton Utara	11.469
Konawe Utara	21.555
Kolaka Timur	-
Konawe Kepulauan	6.868
Muna Barat	1.240
Buton Tengah	26.364
Buton Selatan	551
Kendari	41
Bau Bau	5.970
Provinsi Sulawesi Tenggara	486.976

Tabel 7. Data Produksi Perikanan Budidaya Laut di Provinsi Maluku Utara 2015

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
	Budidaya Laut (Rumput Laut)	Tambak	Kolam
Halmahera Barat	0	72	221,45
Halmahera Tengah	434	0,5	1,91
Kepulauan Sula	12.195	-	-
Halmahera Selatan	9.684	0,2	2,8
Halmahera Utara	27,8	0,81	30,1
Halmahera Timur	49,81	0,32	32,4
Pulau Morotai	198	-	4,1
Pulau Taliabu	18.817	-	-
Ternate	0	-	9,38
Tidore Kepulauan	25	22,9	19,5
Provinsi Maluku Utara	41.430,61	96,73	321,64

Tabel 8. Data Produksi Perikanan Laut di Provinsi Papua Barat 2014

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Laut (Ton)			
	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	Kuartal IV
Fakfak	30,192.20	29,223.10	30,834.70	29,734.10
Kaimana	3,538.30	3,424.60	3,613.50	3,528.00
Teluk Wondama	1,973.10	1,909.80	2,015.10	1,929.30
Teluk Bintuni	1,367.60	1,323.60	1,396.70	1,347.00
Manokwari	550.40	532.70	526.10	538.10
Sorong Selatan	5,763.40	5,578.40	5,886.00	5,635.20
Sorong	3,103.50	3,003.90	3,169.50	3,034.40
Raja Ampat	2,483.10	2,403.40	2,536.00	2,427.80
Tambrauw	9,434.30	9,131.70	9,635.30	9,359.90
Maybrat	635.50	632.60	667.40	638.90
Manokwari Selatan	-	-	-	-

Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	1,325.00	1,282.40	1,353.10	1,295.40
Provinsi Papua Barat	60,384.40	58,446.20	61,633.40	59,468.10

Secara umum dapat dikatakan bahwa potensi perikanan khususnya budidaya laut di timur Indonesia masih cukup besar. Kegiatan budidaya laut dapat terus berkembang, dengan berbagai inovasi didalamnya seperti pengembangan komoditas baru seperti kakap putih yang dapat dibudidayakan di tambak – tambak, daerah wilayah kerja BPBL Ambon yang memiliki area tambak luas seperti di Sulawesi Selatan dapat mengembangkan komoditas ini dengan baik. Dalam segi budidaya ikan hias laut juga telah ditemukan berbagai inovasi teknologi seperti budidaya ikan hias laut dengan system RAS skala rumah tangga. Yang menjadi tantangan saat ini adalah kemampuan BPBL Ambon dalam mencetak calon maupun benih unggul untuk menjamin ketersediaannya di masyarakat.

1.2.2. Permasalahan Perikanan Budidaya Laut

Secara umum, permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya di BPBL Ambon adalah :

- Penyediaan dan distribusi induk unggul dan benih berkualitas masih terbatas;
- Efisiensi pakan masih rendah;
- Biaya produksi yang masih tinggi;
- Penurunan kualitas lingkungan perairan sebagai akibat sedimentasi di perairan Teluk Ambon Dalam;
- Ancaman infeksi penyakit;
- Belum terverifikasinya induk dan benih yang SPF maupun SPR;
- Belum terpenuhinya kebutuhan pakan alami seperti rotifer untuk menunjang kebutuhan pakan awal benih ikan budidaya;
- Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya, terutama terkait dengan kondisi saluran air, system filtrasi media budidaya, dan lainnya;
- Implementasi konsep biosecurity yang belum memadai sehingga intensitas infeksi penyakit pada ikan budidaya masih terus terjadi;
- Pemahaman informasi sumber daya manusia pelaku usaha perikanan budidaya yang masih kurang sehingga agak sulit untuk dilakukan perubahan; dan
- sistem pendataan dan pelaporan yang belum optimal sehingga berakibat terjadinya keterlambatan penyampaian data dukung.
- Resiko atau kendala lain yang bersifat non teknis antara lain perubahan kebijakan yang kadang berubah ubah dalam rentang waktu pendek, efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana sepenuhnya dan factor bencana non alam

seperti saat ini yakni pandemic COVID-19 yang menyebabkan kegiatan prioritas sedikit terhambat akibat adanya pembatasan pergerakan dan perjalanan di wilayah kerja.

1.2.3. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun sektor perikanan budidaya, antara lain:

1. Posisi geografis Indonesia sangat strategis karena terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan juga antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi ini sangat menguntungkan karena menjadi titik persimpangan jalur perdagangan internasional baik dari laut dan udara yang membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi perekonomiannya baik.
2. Pertumbuhan populasi penduduk yang diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,02% per tahun pada periode 2020-2024 atau meningkat dari 271,06 juta orang pada tahun 2020 menjadi 282,24 juta orang pada tahun 2024 (BPS, Bappenas, UN Population Fund 2013) akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan ikan, dari 12,18 juta ton pada tahun 2020 menjadi 13,7 juta ton (KKP 2019). Dalam hal ini, perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang paling mungkin untuk ditingkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan ikan tersebut, mengingat produksi perikanan tangkap yang cenderung mengalami stagnasi.
3. Pasar bebas (*free trade*). Dampak dari globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional adalah mendorong peningkatan arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barriers*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu Indonesia untuk semakin meningkatkan persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan agar produknya dapat diterima oleh pasar internasional.
4. Preferensi masyarakat domestik dan global telah mengalami pergeseran dari konsumsi daging merah menjadi daging putih/ikan. Hal ini mendorong peningkatan permintaan bagi produk perikanan budidaya (DJPB 2017).
5. Perubahan pola tata niaga perikanan budidaya dengan digitalisasi. Era globalisasi dan transformasi industri 4.0 memberikan peluang bagi bisnis perikanan budidaya untuk beralih dari aktivitas *business-as-usual* menjadi aktivitas digitalisasi. Teknologi digital akan mengefisiensi mata rantai pasok industri perikanan dan pemberdayaan bagi pembudidaya kecil. Yang perlu diperkuat adalah kesiapan usaha budidaya skala kecil/menengah untuk adaptif terhadap *startup* aplikasi yang semakin dinamis.
6. Perikanan budidaya menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru. Kondisi eksisting Rumah Tangga Perikanan berjumlah 1,68 juta RTP (KUSUKA 2019). Dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, perikanan budidaya berpotensi mampu menyerap tenaga kerja. Bonus demografi dengan banyaknya populasi kaum pemuda adalah

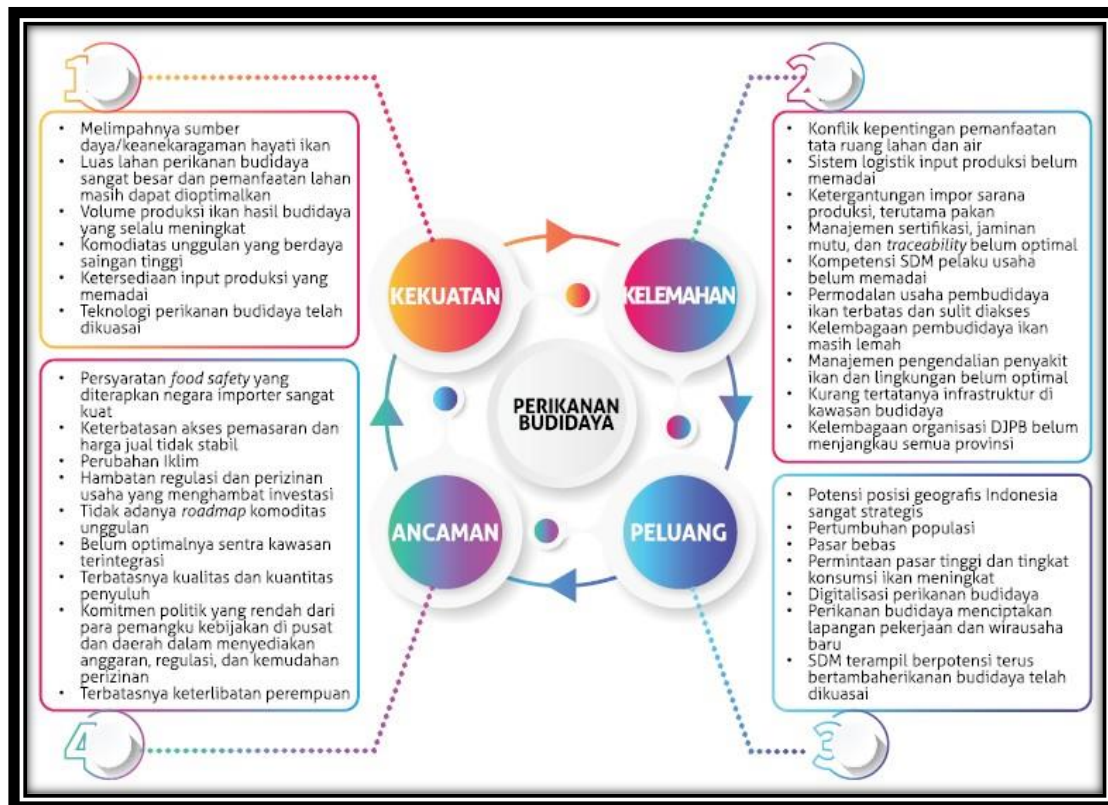
sumber *entrepreneur* serta tenaga kerja di masa datang, sehingga perlu dipersiapkan untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan yang nyata kepada pembangunan ekonomi nasional. Semakin banyak wirausahawan muda yang memulai bisnis di sektor budidaya ikan, maka semakin banyak pula terobosan baru yang menjadikan sektor ini lebih maju.

7. SDM terampil berpotensi terus bertambah, ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi yang memiliki program studi / jurusan perikanan budidaya. Saat ini, terdapat 45 Perguruan Tinggi (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/Politeknik yang memiliki Fakultas Perikanan (Quiper Campus 2019) dan menghasilkan lulusan terampil dan handal yang dapat bersaing di era digital.

Adapun lingkungan strategis yang menjadi tantangan bagi perikanan budidaya Indonesia, diantaranya:

1. Penetapan persyaratan oleh negara-negara importir bagi produk pangan yang masuk ke negaranya, antara lain bebas residu antibiotik, bakteri dan bahan kimia berbahaya lain, ketelusuran (*traceability*), dan sertifikasi.
2. Sebagian besar ekspor perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) masih dalam bentuk *fresh*/bahan baku dan bukan dalam bentuk olahan sehingga nilai tambah yang diperoleh dari aktivitas perikanan budidaya masih sangat kecil.
3. Perubahan iklim, yang mengakibatkan siklus musim tidak menentu sehingga perubahan pola tanam dan masa pemeliharaan yang semakin lama; perubahan suhu permukaan air menyebabkan blooming alga, penurunan DO, dan peningkatan kejadian penyakit; kekeringan menyebabkan kurangnya kadar oksigen dan perubahan salinitas sehingga banyak kasus kematian ikan; dan hujan terus-menerus menyebabkan kenaikan permukaan air, *upwelling*, banjir, kehilangan area pelindung.
4. Kerentanan ekonomi global dan nasional terhadap kejadian luar biasa yang melanda dunia internasional, seperti pandemi virus Covid-19 yang berdampak negatif bagi keberlangsungan dunia usaha, termasuk perikanan budidaya.
5. Regulasi lintas sektor masih lemah dan asimetris, baik *inter* maupun *intra* sektoral, serta perizinan usaha yang cenderung menghambat usaha perikanan budidaya sehingga belum menjamin keamanan investasi untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di Indonesia. Selain itu, pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam tata kelola perikanan budidaya belum optimal.
6. Belum optimalnya sentra/kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi, sehingga aktivitas hulu dan hilir perikanan budidaya belum sejalan
7. Ketersediaan penyuluh yang masih kurang merata di berbagai wilayah serta terbatasnya kompetensi penyuluh sehingga pembudidaya belum mendapatkan pemahaman untuk mengaplikasikan teknologi inovatif terbaru.

8. Komitmen politik yang rendah dari para pemangku kebijakan dalam bentuk kurangnya dukungan anggaran, regulasi, dan kemudahan perizinan.
9. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas perikanan budidaya masih terbatas (paruh waktu dan berpenghasilan rendah), serta besarnya peran pria dalam menentukan aktivitas perempuan dalam keluarganya.



Gambar 3. Potensi, Permasalahan, Peluang dan Tantangan Perikanan Budidaya
(Sumber : Renstra DJPB 2020-2024)

BAB II

VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.”

Selaras dengan visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 maka visi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah “*Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan*” untuk mewujudkan “*Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.*”

2.2. Misi

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu “pengelolaan pemerintahan bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.”

Selaras dengan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 maka misi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah “*Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional*” dan “*pengelolaan pemerintahan bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.*”

2.3. Tujuan

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon menetapkan tujuan pembangunan perikanan budidaya yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi subsector perikanan budidaya laut terhadap perekonomian sektor perikanan nasional, melalui :
 - Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan dan
 - Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPBL Ambon yakni meningkatnya kinerja reformasi birokrasi lingkup BPBL Ambon sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) BPBL Ambon 2020-2024 berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. SS1 : Meningkatnya Ekonomi sektor perikanan budidaya laut;
- b. SS2 : Peningkatan produksi perikanan budidaya BPBL Ambon;
- c. SS3 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif;
- d. SS4 : Tata kelola pemerintahan lingkup BPBL Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Tabel 1. Sasaran strategis dan IKU BPBL Ambon

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Ekonomi sektor perikanan budidaya laut	Nilai PNBP Lingkup BPBL Ambon
Peningkatan produksi perikanan budidaya BPBL Ambon	- Jumlah Tenaga Teknis Binaan lingkup BPBL Ambon - Jumlah bantuan benih ikan laut lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Ekor) - Jumlah bantuan bibit rumput laut kultur jaringan lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Kg)

	- Jumlah bantuan sarana prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket) - Jumlah Bantuan sarana prasarana produksi ikan hias laut lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket) - Jumlah Bantuan sarana prasarana produksi ikan system bioflok lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket) - Jumlah produksi calon induk ikan yang dihasilkan BPBL Ambon sesuai standar (Ekor) - Jumlah Paket Teknologi Perekayasaan Bidang Budidaya Laut lingkup BPBL Ambon (Paket)
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	Terselenggaranya pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BPBL Ambon yang sesuai standar (Sampel)
Tata kelola pemerintahan lingkup BPBL Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan priman	- Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Ambon; - Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (%) - Nilai rekon kinerja lingkup BPBL Ambon - Nilai WBK lingkup BPBL Ambon - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%) - Persentase penyelesaian LHP BPK lingkup BPBL Ambon - Nilai kinerja anggaran lingkup BPBL Ambon - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup BPBL Ambon

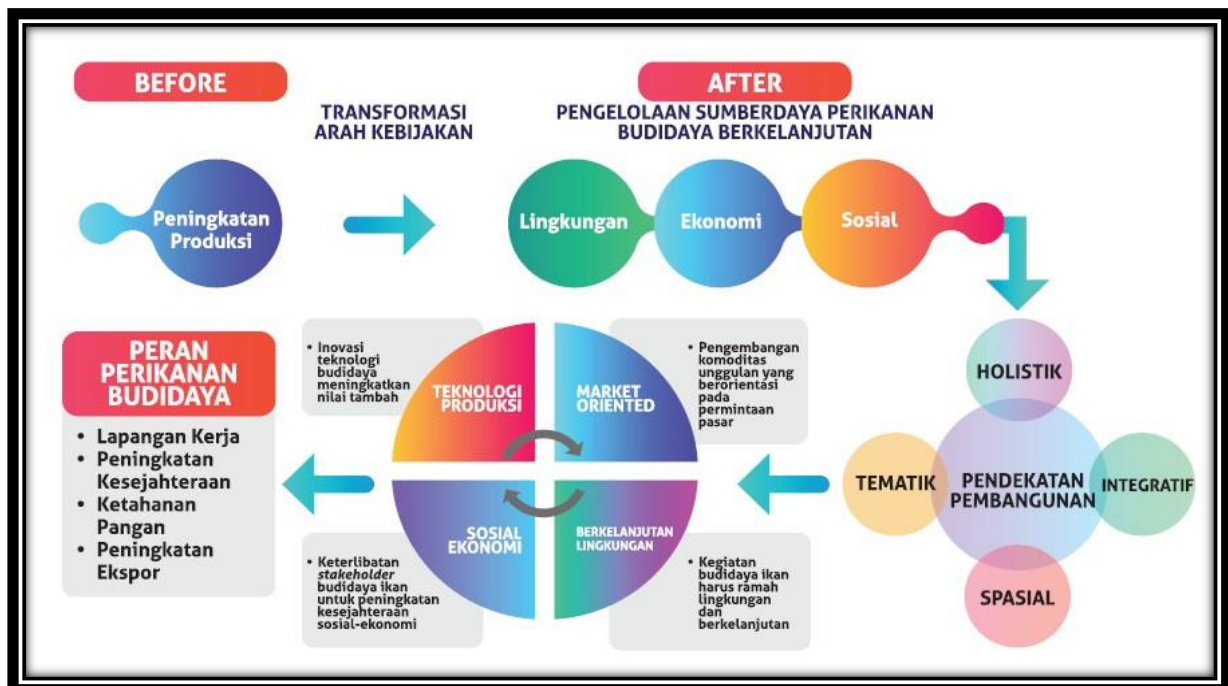
BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi DJPB

Arah kebijakan Ditjen Perikanan Budidaya adalah “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan”, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial, pada periode 2020-2024. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Fokus pembangunan perikanan budidaya bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024
(Sumber : Masterplan Perikanan Budidaya 2020-2024)

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi pengelolaan kawasan berkelanjutan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi sebagaimana dijabarkan pada gambar 5 berikut ini :



Gambar 5. Strategi Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024
(Sumber : Renstra DJPB 2020 – 2024)

1. Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan

Pengelolaan kawasan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa strategi dan langkah operasional sebagai berikut:

- A. Peningkatan tata kelola pemanfaatan lahan dan air, yang dilakukan melalui:
 - Penyusunan regulasi potensi lahan dan air untuk perikanan budidaya;
 - Sinkronisasi tata ruang perikanan budidaya sesuai Perda RZWP-3-K dan RTRW, dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, jenis komoditas, dan kesesuaian lahan;
 - Percontohan kluster kawasan tambak udang berkelanjutan berbasis kerakyatan;
 - Memperkuat kelembagaan pengelola irigasi perikanan, pembudidaya ikan, pokwasmas, dan pengelola perairan umum daratan; dan
 - Pengelolaan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan.
- B. Penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan, dilakukan melalui:
 - Penerapan Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA);
 - Penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - Peningkatan efisiensi energi dalam sistem produksi;
 - Penggunaan pakan dan obat ikan yang sesuai ketentuan;
 - Pengembangan ikan-ikan herbivora untuk mengurangi ketergantungan terhadap pakan buatan;
 - Penggunaan Recirculation Aquaculture System (RAS);
 - Implementasi Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA); dan
 - Penerapan teknologi ramah lingkungan lainnya.
- c. Pemanfaatan perairan umum daratan untuk kegiatan perikanan budidaya berkelanjutan dilakukan melalui:
 - Penyusunan regulasi untuk pengembangan perikanan berbasis budidaya di perairan umum daratan;
 - Penerapan perikanan berbasis budidaya di perairan umum daratan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya;
 - Penebaran ikan budidaya di perairan umum sesuai ketentuan; dan
 - Pendampingan teknis penanganan kawasan perikanan budidaya di perairan umum.
- d. Pembangunan prasarana perikanan budidaya, dilakukan melalui:
 - Penyusunan DED perikanan budidaya;
 - Integrasi dengan lintas sektor melalui rehabilitasi atau pembangunan prasarana di kawasan perikanan budidaya;

- Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - Penataan dan revitalisasi prasarana perikanan budidaya; dan
 - Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
- e. Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan dilakukan melalui:
- Penguatan regulasi bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - Pengendalian resistensi anti mikroba (Antimicrobial resistance);
 - Penguatan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)
 - Pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi;
 - Jejaring laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - Pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - Pengendalian peredaran pakan dan obat ikan;
 - Pengendalian ikan berbahaya dan/atau ikan merugikan;
 - Pengelolaan limbah perikanan budidaya; dan
 - Surveilans dan monitoring penyakit ikan.

2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Peningkatan produksi perikanan budidaya dilakukan melalui strategi dan langkah operasional sebagai berikut:

- a. Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, dan laut, dilakukan melalui:
- Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - Penerapan teknologi adaptif dan efisien;
 - Pemetaan rantai pasok pasar untuk mengetahui preferensi konsumen;
 - Pengembangan komoditas ekspor bernilai ekonomis tinggi untuk peningkatan devisa (contoh: udang, lobster, cobia, dll);
 - Pengembangan komoditas unggulan untuk ketahanan pangan;
 - Pengembangan spesies endemik;
 - Pengembangan budidaya ikan hias; dan
 - Pengembangan rumput laut kultur jaringan.
- b. Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan), dilakukan melalui:
- Peningkatan kualitas induk ikan;
 - Penyusunan regulasi yang terkait dengan input produksi;

- Pengembangan pakan ikan mandiri yang murah dan berkualitas menggunakan bahan baku lokal;
- Penguatan unit produksi pakan di UPT;
- Pengembangan laboratorium uji pakan dan obat ikan di UPT;
- Pembangunan pabrik pakan di sentra produksi;
- Modernisasi sarana produksi induk dan benih;
- Penerapan RAS pada pembenihan ikan;
- Pengembangan bank genetik induk;
- Pemanfaatan teknologi digital pada unit budidaya ikan;
- Peningkatan teknologi budidaya pakan alami;
- Penyusunan regulasi tentang sistem logistik perbenihan nasional;
- Pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat baru;
- Rehabilitasi UPT DJPB, UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan UPR/HSRT untuk meningkatkan kapasitas produksi benih dan induk;
- Pembangunan broodstock center dan naupli center yang menjangkau sentra produksi ikan dan udang; dan
- Penguatan sistem jejaring perbenihan.

c. Sertifikasi Perikanan Budidaya, dilakukan melalui:

- Penyusunan regulasi untuk mendukung sertifikasi dan penerapan sistem jaminan mutu perikanan budidaya;
- Penyusunan, penerapan dan pembinaan SNI perikanan budidaya;
- Pembentukan organisasi dan kelembagaan sertifikasi perikanan budidaya;
- Pengendalian pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya;
- Peningkatan status sertifikasi perikanan budidaya untuk diterima di pasar internasional;
- Peningkatan jumlah dan kompetensi auditor; dan
- Pembinaan sertifikasi budidaya.

d. Inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya yang modern dan berkelanjutan, dilakukan melalui:

- Perekayasaan teknologi produk/proses produksi pembenihan, pembesaran, pakan, obat ikan, dan kesehatan ikan;
- Diseminasi teknologi perikanan budidaya kepada masyarakat;
- Pelaksanaan percontohan teknologi perikanan budidaya;
- Pengembangan teknologi budidaya lepas pantai/offshore;

- Intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produksi perikanan budidaya; dan
- Inovasi teknologi untuk adaptasi perubahan iklim.

3. Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya

Peningkatan kesejahteraan pembudidaya dilakukan melalui strategi dan langkah operasional sebagai berikut:

a. Perlindungan usaha bagi pembudidaya skala kecil dilakukan melalui:

- Fasilitasi perizinan berusaha bidang perikanan budidaya;
- Penerapan asuransi usaha perikanan budidaya;
- Fasilitasi asuransi mandiri untuk usaha perikanan budidaya;
- Penjaminan ketersediaan pasar bagi usaha perikanan budidaya; dan
- Penyediaan informasi mitigasi resiko, antara lain bencana alam, wabah penyakit, perubahan iklim, pencemaran lingkungan.

b. Tata kelola kemitraan usaha, dilakukan melalui :

- Pemanfaatan inovasi digital untuk kemitraan usaha perikanan budidaya;
- Penyelenggaraan sosialisasi usaha perikanan budidaya
- Penyediaan informasi analisa usaha budidaya
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholders perikanan budidaya c. Pembinaan kelembagaan pelaku usaha dilakukan melalui:
- Penataan regulasi kelembagaan pembudidaya ikan
- Mendorong kelompok pembudidaya ikan untuk berbadan hukum
- Mendorong pembentukan jejaring usaha input produksi
- Kolaborasi antara pembudidaya ikan - unit pengolahan ikan - distributor besar harus terus dijaga.
- Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan pembudidaya ikan.
- Pendataan dan pemetaan pelaku usaha perikanan budidaya berdasarkan skala usaha

c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui:

- Sertifikasi kompetensi pelaku usaha pembudidayaan ikan;
- Peningkatan kompetensi SDM melalui kerjasama dengan multi-stakeholders;
- Peningkatan peran penyuluh dan tenaga teknis UPT; dan
- Pelatihan teknis dan manajerial.

d. Kemudahan akses pembiayaan dan stimulus usaha bagi pembudidaya ikan, dilakukan melalui:

- Fasilitasi pembiayaan dengan lembaga keuangan
- Sinergisitas pemanfaatan CSR untuk kegiatan perikanan budidaya
- Pemberian bantuan sarana produksi

- Kemudahan mendapatkan insentif usaha bagi unit pembudidayaan ikan yang telah tersertifikasi dan teregistrasi dalam Kartu KUSUKA.
- e. Sertifikasi lahan pembudidayaan ikan dilakukan melalui:
 - Penyusunan regulasi tentang fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi lahan pembudidayaan ikan
 - Fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi lahan pembudidayaan ikan
 - Pendataan dan informasi sertifikasi lahan pembudidayaan ikan

4. Dukungan Lintas Sektor

Strategi integratif dalam pembangunan perikanan budidaya dilakukan melalui beberapa langkah operasional sebagai berikut:

- a. Harmonisasi regulasi dilakukan melalui:
 - Pengusulan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan
 - Penyederhanaan regulasi terkait perikanan budidaya di Pusat dan Daerah
 - Diterbitkannya NSPK terkait dengan kewenangan konkuren tingkat provinsi/kabupaten/kota terkait perikanan budidaya
 - Penyusunan regulasi yang merupakan amanah peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi baru yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perikanan budidaya.
- b. Integrasi lintas sektor dilakukan melalui:
 - Kesepakatan kerjasama dengan pihak mitra, meliputi kerjasama luar negeri (baik bilateral dan multilateral), proyek-proyek hibah, kerjasama antar lembaga dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, NGO, dan Swasta.
 - Integrasi pendataan perikanan budidaya antara Pusat dan Daerah
 - Pengembangan prasarana dan sarana di sentra produksi perikanan budidaya (listrik, air, jalan produksi, pemukiman, unit pengolah, gudang
 - Sinergi program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan perikanan budidaya dilakukan baik dari pemerintah (APBN, APBD, DAK), lembaga keuangan (perbankan dan BLU LPMUKP), investor, Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak BUMN dan Swasta, Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), dan sumber pendanaan lainnya.

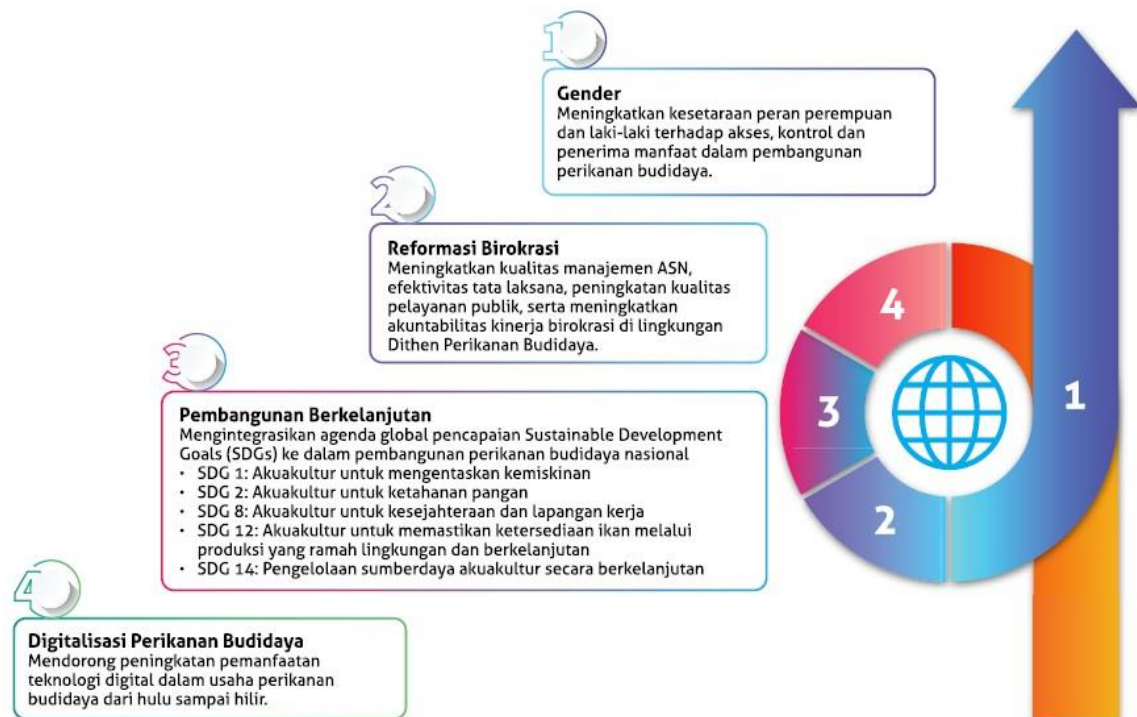
5. Pengarusutamaan

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi di atas, pembangunan perikanan budidaya 2020-2024 juga mengintegrasikan 4 pengarusutamaan yang mendukung Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya, diantaranya:

- Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan perikanan budidaya. Pengarusutamaan Gender dalam perikanan budidaya dilakukan melalui: (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP; c) Penyiapan roadmap PUG; d) Penyusunan data terpilah; e) Pengembangan statistik gender; (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil Gender; (h) Monitoring dan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) DJPB.
- Reformasi Birokrasi, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. Reformasi Birokrasi di DJPB dilakukan melalui: (a) Pelaksanaan manajemen perubahan dan peningkatan integritas SDM, (b) Kelembagaan yang tepat struktur, tepat fungsi, dan tepat proses; (c) Review dan harmonisasi peraturan; (d) Penguatan SDM melalui transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional, penghitungan beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan LHKPN; (e) Penataan proses bisnis sesuai Renstra sampai dengan SOP; (f) Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko; (g) Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), penanganan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, penolakan gratifikasi; (h) Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.
- Pembangunan Berkelanjutan, yang diarahkan untuk mengintegrasikan agenda global pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam pembangunan perikanan budidaya nasional. Sejalan dengan SDGs, pembangunan perikanan budidaya akan mempertimbangkan 5 aspek, yaitu lingkungan (planet), masyarakat (manusia), kesejahteraan, kemitraan, dan perdamaian dan 2 karakteristik yaitu no one left behind dan inclusiveness (United Nations 2015). Pembangunan Berkelanjutan dalam perikanan budidaya dilakukan melalui: (i) peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha budidaya ikan untuk mengentaskan kemiskinan di berbagai wilayah (Tujuan SDG 1 End Poverty); (ii) peningkatan produksi ikan hasil perikanan budidaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Tujuan SDG 2 Zero Hunger); (iii) peningkatan daya saing produk perikanan budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan dan penciptaan lapangan kerja (Tujuan SDG 8 Decent Work and Economic Growth); (iv) memastikan

ketersediaan pasokan ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Tujuan SDG 12 Responsible Consumption and Production), dan (v) pengelolaan sumber daya perikanan budidaya secara berkelanjutan (Tujuan SDG 14 Live Below Water) (FAO 2017).

- Digitalisasi perikanan budidaya, yang diarahkan untuk menumbuhkan geliat usaha perikanan budidaya bagi generasi muda (milenial) yang telah melek terhadap teknologi digital. Strategi yang dilakukan meliputi: (i) inovasi usaha perikanan budidaya dengan Teknologi 4.0 (contoh: Auto Feeder, Investasi Digital, sistem pemantauan/monitoring, sistem pengendalian); dan (ii) Pemanfaatan teknologi digital untuk mengefisiensikan mata rantai pasok, sehingga pembudidaya ikan dapat memasarkan produknya langsung ke konsumen tanpa melewati rantai pasok yang panjang, dengan biaya transaksi menjadi lebih murah, harga jual yang lebih baik, dan keuntungan yang lebih besar.



Gambar 6. Pengarusutamaan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020 – 2024
(Sumber : Renstra DJPB 2020 -2024)

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPBL Ambon

Kebijakan BPBL Ambon tahun 2020 – 2024 adalah melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Tujuan program ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan budidaya yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut maka BPBL Ambon focus pada kegiatan :

1. Pengelolaan Perbenihan Ikan
2. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Arah pengembangan perikanan budidaya laut BPBL Ambon tahun 2020 – 2024 yaitu mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, dengan strategi yang digunakan :

1. Memproduksi Calon Induk dan Benih Unggul berbagai komoditas unggulan seperti Bubara, Kakap Putih, dan Ikan Hias Laut.
2. Pendampingan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan dengan system bioflok yang tepat sasaran.
3. Pendampingan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana model usaha budidaya ikan hias laut dengan system RAS yang tepat sasaran.
4. Pendampingan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut di masyarakat.
5. Perlindungan dan monitoring kawasan perikanan budidaya terhadap kejadian serangan hama penyakit ikan melalui kegiatan survailance.
6. Revitalisasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya; dan
7. Perekayasa teknologi bidang budidaya laut.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. DJPB akan mendorong adanya harmonisasi regulasi, yakni menghilangkan tumpang tindih peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya antar kementerian/lembaga, maupun dengan peraturan di tingkat daerah. Ini tentunya sesuai amanat Presiden yang berkaitan dengan penerapan *omnibus law*.

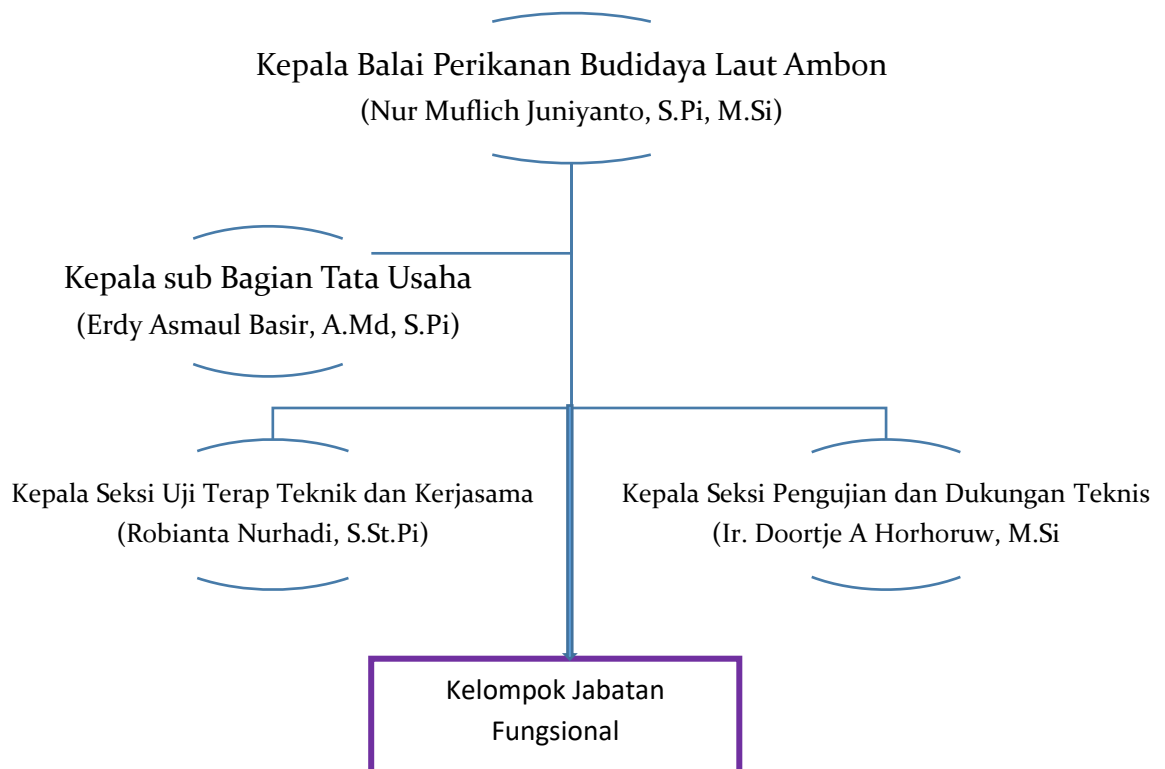
Peranan BPBL Ambon adalah membantu dan mendukung DJPB dalam kapasitas menyusun kerangka acuan/regulasi pemerintah terkait kegiatan budidaya ikan serta pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja Sama
4. Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :



Gambar 7. Struktur Organisasi BPBL Ambon Th. 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/MEN-SJ/KP.430/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Setara Eselon III lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada surat keputusan tersebut terdapat penggantian Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dari pejabat sebelumnya Tinggal Hermawan, S.Pi, M.Si kepada Pejabat baru, Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si. Dalam menjalankan tugasnya, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kepala sub bagian, Kepala seksi, kelompok jabatan fungsional dan seluruh pegawai yang berjumlah 55 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya visi dan misi BPBL Ambon.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Indikator kinerja BPBL Ambon 2020 – 2024 disusun berdasarkan arah dan kebijakan DJPB dalam penetapan pagu indikatif setiap tahun anggaran. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPBL Ambon 2020 - 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Laut	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	934.250.000	942.300.000	950.350.000	958.400.000	966.450.000
2.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya BPBL Ambon	Jumlah Tenaga Teknis Binaan lingkup BPBL Ambon (Orang)	750	750	750	750	750
		Jumlah bantuan benih ikan laut lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Ekor)	1.495.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
		Jumlah bantuan bibit rumput laut kultur jaringan lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Kg)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Jumlah bantuan sarana prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket)	1	20	20	20	20
		Jumlah Bantuan sarana prasarana produksi ikan hias laut lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket)	8	24	24	24	24
		Jumlah Bantuan sarana prasarana produksi ikan system bioflok lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket)	6	10	10	10	10
		Jumlah produksi calon induk ikan yang dihasilkan BPBL Ambon sesuai standar (Ekor)	3400	2200	2200	2200	2200
		Jumlah Paket Teknologi Perekrutasaan	1	1	1	1	1

		Bidang Budidaya Laut lingkup BPBL Ambon (Paket)					
3.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	Terselenggaranya pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BPBL Ambon yang sesuai standar (Sampel)	1950	1950	1950	1950	1950
4.	Tata Kelola Pemerintahan lingkup BPBL Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPBL Ambon	72	72	72	72	72
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)	82	82	82	82	82
		Nilai Rekon Kinerja lingkup BPBL Ambon (%)	85	85	85	85	85
		Nilai WBK lingkup BPBL Ambon (Nilai)	76	76	76	76	76
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	60	60	60	60
		Persentase Penyelesaian LHP BPK Lingkup BPBL Ambon	100	100	100	100	100
		Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon (%)	85	85	85	85	85
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BPBL Ambon (%)	88	88	88	88	88

4.2. Kerangka Pendanaan

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada tahun 2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran :

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Kinerja BPBL Ambon 2020 - 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Laut	Nilai PNPB BPBL Ambon (Rp)	934.250.000	942.300.000	950.350.000	958.400.000	966.450.000

2.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya BPBL Ambon	Jumlah Tenaga Teknis Binaan BPBL Ambon (Orang)					
		Jumlah bantuan benih ikan laut lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Ekor)	6.542.020.00	7.211.810.000	7.511.810.000	7.811.810.000	8.111.810.000
		Jumlah bantuan bibit rumput laut kultur jaringan lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Kg)	1.010.144.000	1.280.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000
		Jumlah bantuan sarana prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket)	50.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		Jumlah Bantuan sarana prasarana produksi ikan hias laut lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket)	220.000.000	864.000.000	864.000.000	864.000.000	864.000.000
		Jumlah Bantuan sarana prasarana produksi ikan system bioflok lingkup BPBL Ambon yang tepat sasaran (Paket)	1.200.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
		Jumlah produksi calon induk ikan yang dihasilkan BPBL Ambon sesuai standar (Ekor)	1.036.629.000	1.017.824.000	1.036.629.000	1.055.434.000	1.074.239.000
		Jumlah Paket Teknologi Perekayasaan Bidang Budidaya Laut lingkup BPBL Ambon (Paket)	311.500.000	311.500.000	311.500.000	311.500.000	311.500.000
3.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	Terselenggaranya pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BPBL Ambon yang sesuai standar (Sampel)	702.260.000	626.454.000	656.454.000	686.454.000	716.454.000
4.	Tata Kelola Pemerintahan lingkup BPBL Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPBL Ambon					
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)					

		Nilai Rekon Kinerja lingkup BPBL Ambon (%)					
		Nilai WBK lingkup BPBL Ambon (Nilai)					
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)					
		Persentase Penyelesaian LHP BPK Lingkup BPBL Ambon					
		Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon (%)					
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BPBL Ambon (%)					

BAB V

PENUTUP

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2020-2024 akan terus disempurnakan bersamaan dengan proses penyusunan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan Teknokratik Renstra DJPB hingga ditetapkan Peraturan Dirjen PB tentang Rencana Strategis DJPB Tahun 2020-2024.

Ambon, Agustus 2020

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si